

## PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN TINGKAT SLTP DI DAERAH PERBATASAN KALBAR-MALAYSIA

Oleh:  
Harun

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1) tingkat pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan SLP 2) pengaruh faktor geografis, sosial-ekonomi, budaya terhadap penawaran pendidikan dan permintaan pendidikan anak usia 13-15 tahun; 3) pengaruh faktor geografis, sosial-ekonomi, budaya, penawaran pendidikan, dan permintaan pendidikan terhadap keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya ke SLP; 4) merekomendasikan alternatif kebijakan jenis wajib belajar pendidikan SLP.

Populasi penelitian ialah orang tua anak usia 13-15 tahun di daerah perbatasan Kalbar-Malaysia, dengan sampel 405 orang. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan kuesioner mencakup kondisi geografis, sosial-ekonomi, budaya, penawaran pendidikan, permintaan pendidikan dan keputusan orang tua. Uji validitas instrumen menggunakan analisis faktor dan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha dari Cronbach. Analisis data dengan statistik deskriptif, regresi, dan analisis jalur dengan tiga langkah: analisis jalur terhadap keputusan orang tua secara umum. Kenyataan menunjukkan bahwa ada orang tua yang keputusannya menyekolahkan tapi tidak menyekolahkan, oleh karena itu dilakukan analisis jalur kedua untuk orang tua yang menyekolahkan dan ketiga untuk orang tua yang tidak menyekolahkan. Uji keberartian koefisien jalur: 0,05.

Analisis deskriptif keenam variabel yang dilibatkan menunjukkan kategori sedang. Uji hipotesis tahap pertama menunjukkan: 1) penawaran pendidikan dipengaruhi secara positif oleh variabel geografis, sosek, dan budaya; 2) permintaan pendidikan dipengaruhi secara langsung dan positif oleh geografis, sosek, budaya dan penawaran pendidikan, dan juga secara tidak langsung melalui penawaran pendidikan; 3) keputusan orang tua menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anak dipengaruhi secara langsung oleh geografis, sosek, budaya, penawaran pendidikan, dan permintaan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penawaran dan permintaan pendidikan.

Analisis tahap kedua menunjukkan bahwa: keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak tidak dipengaruhi oleh geografis dan sosial-ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penawaran dan permintaan pendidikan, sedangkan budaya, penawaran dan permintaan pendidikan memberikan pengaruh yang berarti. Analisis tahap ketiga menunjukkan bahwa: Keputusan orang tua untuk tidak menyekolahkan anak dipengaruhi oleh geografis, budaya, penawaran dan permintaan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan sosek tidak mempengaruhinya.

Alternatif kebijakan yang direkomendasikan: 1) memperluas jenis pendidikan SLP seperti: SLP satu atap dengan SD/MI atau SLP kelas jauh dengan memanfaatkan fasilitas SD/MI; 2) menyamakan visi dan langkah antara Pemda dengan Kanwil Depdikbud terutama menyangkut anggaran; dan 3) memperluas peran GNOTA Kalbar hingga tingkat kecamatan.

*Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tingkat SLTP  
di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia*

## **Pendahuluan**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat terutama pada penghujung abad 20 ini, merupakan indikasi strategisnya posisi sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas itu diraih lewat pendidikan dan latihan-latihan.

Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas oleh suatu bangsa, maka bangsa itu akan menempati posisi papan atas dalam berbagai kemajuan yang dicapainya. Misalnya: Jepang; Korea Selatan; Singapura; Taiwan dan Malaysia. Kualitas sumber daya manusia di negara-negara yang disebutkan itu telah melewati jenjang pendidikan minimal tingkat SLTA (Jalaludin Rahmat, 1996).

Indonesia, yang termasuk salah satu negara Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik, bertekad ingin mengejar ketertinggalan dalam bidang kualitas sumber daya manusia. Sebagai ilustrasi tentang keadaan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dewasa ini ialah 80,7% berpendidikan maksimal SD; 17,3% berpendidikan SMTP dan SMTA; dan yang berpendidikan tinggi hanya 2% (Data Menko Kesra, dalam Daliman, 1995). Kondisi ini menuntut bangsa Indonesia untuk kerja lebih keras dalam mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Tekad ini telah diwujudkan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1994 (pelita VI). Program Wajib belajar 9 tahun ini oleh Presiden Suharto ditegaskan harus selesai dalam jangka waktu 10 tahun (pelita VI dan VII) ketika berlangsung Rakernas Depdikbud 1996 pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Mei 1996 di Sawangan. Beliau lebih jauh menegaskan, "Dengan selesainya program wajib belajar 9 tahun itu, kekuatan kita dalam membangun masyarakat industri akan dapat kita tingkatkan" (Republika, 23 Mei 96).

Kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan, di Kalbar mempunyai ciri tersendiri, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Salah satu ciri spesifik dan mempunyai implikasi besar terhadap aspek pembangunan lainnya adalah letak wilayahnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Sarawak, Malaysia Timur). Bahkan, Kalbar kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang

mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar menuju atau dari negara tetangga (Bappeda, 1993).

Penelitian Tim Pengembangan Daerah Perbatasan (1990) menemukan bahwa: (1) telah sejak lama berlangsung migrasi tenaga kerja musiman dari wilayah Kalbar menuju beberapa tempat di Sarawak; (2) sarana pendidikan yang menyangkut jenis, jenjang, mutu, jumlah dan penyebarannya masih sangat kurang; (3) ketrampilan kerja sebagian besar penduduk hanya memiliki ketrampilan pertanian tradisional dan berpindah-pindah. Belum lagi jika melihat letak pemukiman yang masih terpencar-pencar.

Akibat letak penyebaran penduduk yang terpencar-pencar itu, terutama bagi anak-anak sekolah, jarak tempuh antara tempat tinggal dengan lokasi sekolah menjadi relatif sangat jauh. Karena jarak tempuh yang jauh itu, sebagian besar anak usia SLP memilih tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi setelah menamatkan Sekolah Dasar. Kondisi ini, ditambah lagi dengan keterbatasan alat transportasi baik pribadi maupun umum.

Sebagai gambaran kondisi pendidikan di daerah perbatasan Kalbar-Sarawak, khususnya tingkat SLP yang ditunjukkan dengan parameter angka partisipasi murni (APM) sebesar 36,40% dari jumlah anak usia SLP sebanyak 14.547 orang anak yang tersebar di sebelas kecamatan (Jarlit, 1995). Secara rinci APM di tiap kecamatan itu menunjukkan: (1) Kecamatan Paloh 28,10%; (2) Seluas 21,10%; (3) Teluk Keramat 30,16%; (4) Sejangkung 20,25%; (5) Sekayam 32,38%; (6) Ketungau Hulu 32,15%; (7) Ketungau Tengah 27,83%; (8) Badau 70,48%; (9) Batang Lupar 39,64%; (10) Embaloh Hulu 71,35%; dan (11) Empanang 26,99%. Sementara itu, Penelitian Asrori dan Harun (1992) memperkuat kondisi pendidikan masyarakat perbatasan, bahwa tingkat kepedulian masyarakat Sekayam terhadap pendidikan sangat rendah (23,92%). Artinya, kesadaran masyarakat Sekayam khususnya dan masyarakat perbatasan pada umumnya masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Persoalannya sekarang adalah, mengapa masyarakat daerah perbatasan Kalbar-Sarawak Malaysia masih banyak yang belum menikmati pendidikan dasar terutama tingkat sekolah lanjutan pertama (SLP). Jika Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai upaya untuk meratakan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, maka daerah perbatasan Kalbar dengan

## ***Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tingkat SLP di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia***

Sarawak Malaysia merupakan prioritas utama. Untuk itu, kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam mengatasi persoalan pemerataan pendidikan dasar tingkat SLP di daerah perbatasan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak.

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan itu pada hakekatnya mengandung makna bahwa tidak membedakan setiap warga negara untuk memperolehnya secara adil dan demokratis tanpa kecuali. Pemerataan menurut Coleman (1966); Farrell (1982); Ace Suryadi (1993) meliputi empat komponen: (1) pemerataan kesempatan memasuki sekolah bagi anak usia sekolah secara adil; (2) pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah; (3) pemerataan untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan; dan (4) pemerataan kesempatan untuk menikmati manfaat pendidikan.

Sementara itu Mendikbud Wardiman (1993) mengemukakan tiga makna pemerataan yang terkandung di dalamnya: (1) setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan; (2) setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan; (3) adanya kesesuaian perlakuan selaras dengan kondisi internal dan eksternal peserta didik. Jadi, pemerataan yang dimaksudkan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pemerataan dalam arti *equality* .

Dengan demikian, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tingkat SLP dalam penelitian ini meliputi: (1) pemerataan persamaan kesempatan untuk menikmati pendidikan SLP; (2) pemerataan akses yang sama dalam pendidikan SLP; dan (3) pemerataan keadilan/kewajaran dalam memperoleh pendidikan SLP, dengan tidak membedakan aspek budaya, sosial-ekonomi, dan geografis yang ada dalam masyarakat perbatasan Kalbar.

### **Pembahasan**

Secara umum penelitian ini menemukan bahwa pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tingkat SLP bagi anak usia 13-15 tahun baru mencapai angka partisipasi murni (APM) sebesar 38,19%, bahkan untuk daerah sampel penelitian baru mencapai APM sebesar 32,52%. Angka ini masih jauh dibawah angka APM tingkat Propinsi: 43,14%. Temuan APM

tersebut jika dihubungkan dengan angka "tuntas pratama" sebesar antara 80-85% APM-nya, maka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun di daerah perbatasan masih memprihatinkan. Oleh karena itu keseriusan untuk mencapai angka "tuntas pratama" sampai pada akhir Pelita VII merupakan tugas berat Pemerintah Daerah TK I Kalbar khususnya Kanwil Depdikbud Propinsi Kalbar.

Hasil studi ini yang menarik adalah terletak pada kondisi geografis yang dapat dijangkau justru menunjukkan angka yang tinggi (72,8%) pada orang tua yang tidak menyekolahkan. Hal ini berkorelasi dengan budaya, penawaran, dan permintaan pendidikan. Ternyata, orang tua yang berada pada posisi budaya tinggi (pengetahuan, wawasan, dan penghargaan pada nilai pendidikan) menunjukkan bahwa meskipun kondisi geografis sulit ditempuh, sosial-ekonomi rendah, permintaan pendidikannya tinggi dan keputusan untuk menyekolahkan anaknya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Sodiq (1995); Grant (1990); Noeng Muhajir (1993), dan Bintarto (1989) yang mengatakan faktor geografis dan sosial-ekonomi menjadi penghambat dalam memperoleh kesempatan pendidikan bukan berdiri sendiri, melainkan sikap mental dan budaya yang menjadi penghambat utama untuk mengikuti kegiatan belajar. Sikap mental ini sering muncul dan paling banyak muncul pada masyarakat miskin dan pedalaman.

Sikap mental dan budaya yang menyerah pada alam sekitar seakan-akan lekat menempel pada masyarakat perbatasan yang nota bene di pedalaman dan terpencil. Ini berarti budaya untuk maju dan merubah kondisi dari tradisi yang turun temurun kepada kondisi yang inovatif masih lemah dan rendah. Penelitian ini juga mendukung temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrori dan Harun (1992) yang menyatakan budaya *mengambin* dan menoreh getah karet, serta mendulang emas masih turun temurun dari pada melanjutkan sekolah ke SLP setelah tamat SD/MI.

Untuk meningkatkan keputusan orang tua dalam menyekolahkan anaknya yang baerusia 13-15 tahun di daerah perbatasan, perlu dilakukan kampanye besar-besaran guna menyadarkan orang tua tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan, baik lewat jalur persekolahan maupun luar sekolah, sehingga permintaan pendidikan orang tua anak usia 13-15 tahun

*Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tingkat SLTP  
di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia*

di daerah perbatasan semakin meningkat dalam bentuk transaksi pendidikan. Kampanye sadar pendidikan ini antara lain berisikan (Sumarno 1996): 1) penyuluhan manfaat pendidikan dalam memperebutkan kesempatan sosial-ekonomi; 2) penyuluhan tentang berbagai kemudahan dalam memanfaatkan peluang pendidikan di tingkat SLP; 3) penyuluhan tentang berbagai jenis pendidikan SLP yang dapat ditempuh oleh anak usia 13-15 tahun; 4) penyuluhan tentang berbagai lembaga-lembaga sosial yang dapat membantu pembiayaan pendidikan dan GNOTA. Selain kampanye tentang sadar pendidikan secara besar-besaran, usaha pengentasan kemiskinan menjadi upaya strategis sebagai salah satu daya dukung pembiayaan pendidikan bagi keluarga.

Dari sisi sosial-ekonomi penelitian ini menemukan pula bahwa orang tua yang berstatus rendah, sedang, dan tinggi keadaan sosial-ekonominya, tinggi pula orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Kondisi ini didukung oleh kondisi obyektif bahwa lulusan pendidikan SLP di daerah perbatasan, kesulitan dalam mendapatkan kesempatan sosial-ekonomi, sehingga mereka lebih cenderung tidak menyekolahkan anaknya ke SLP. Orang tua lebih memilih mengirim anaknya yang telah tamat SD/MI ke Malaysia untuk mencari kerja daripada melanjutkan sekolah ke SLP. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan beberapa orang tua yang tidak menyekolahkan anak yang berusia 13-15 tahun (wawancara tanggal 18-5-97).

Kondisi semacam ini, jika dihubungkan dengan hasil temuan penelitian, bermuara pada kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan, selain itu kurangnya perhatian pemerintah dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan terutama untuk daerah perbatasan dan terpencil. Hal ini sejalan dengan pendapat Daliman (1995) bahwa pembangunan pendidikan khususnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun harus lebih diutamakan bagi mereka yang berada di pedalaman dan terpencil, termasuk daerah perbatasan Kalbar-Sarawak Malaysia. Oleh karena itu besar kemungkinan bahwa orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya itu, belum memperoleh bagian "kue" hasil pembangunan, sehingga orang tua memutuskan tidak menyekolahkan anaknya yang bersusia 13-15 tahun ke SLP setelah tamat SD/MI.

Faktor geografis, sosial-ekonomi, dan budaya orang tua secara lang-

sung dan positif mempengaruhi penawaran pendidikan bagi orang tua. Sumbangan efektif secara simultan ketiga variabel tersebut sebesar 41,57%. Faktor budaya memberikan sumbangan paling besar yakni 19,99%, kemudian sosial-ekonomi 11,02%, dan sumbangan terkecil faktor geografis yakni 10,57%.

Faktor budaya memberikan sumbangan paling besar dalam penawaran pendidikan bagi orang tua. Pada dasarnya penawaran pendidikan (kebijakan pendidikan SLP yang ditawarkan) kepada orang tua, akan dipahami dan akan dimengerti oleh orang tua, manakala orang tua itu telah memiliki wawasan, pengetahuan, nilai, dan penghargaan terhadap pendidikan. Akumulasi dan kristalisasi dari wawasan, pengetahuan, dan penghargaan akan nilai pendidikan berujud dalam keterpahaman dan kemengertian seseorang terhadap pendidikan. Keterpahaman dan kemengertian itu diperoleh melalui berbagai macam informasi yang diterimanya: penyuluhan, berita media cetak dan elektronik, dan penjelasan-penjelasan yang diterima secara berhadapan maupun secara langsung orang perorang akan membentuk pengalaman seseorang. Newcomb (1985) informasi yang akan menumbuhkan keterpahaman dan kemengertian adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi individu-individu yang mencerminkan pengertian yang mendalam mengenai kondisi yang lebih terperinci yang menggerakkan optimisme.

Informasi mengenai kebijakan SLP akan menjadi pengetahuan, wawasan, nilai, dan penghargaan pendidikan yang sesuai dengan kondisi-kondisi orang tua di daerah perbatasan. Jadi, sangat beralasan, kalau budaya seseorang itu memberikan pengaruh yang besar terhadap penawaran pendidikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumarno (1996) pengalaman seseorang yang terbentuk lewat berbagai macam pendekatan akan melahirkan sikap optimisme terhadap pendidikan yang ditawarkan. Dengan budaya yang telah dimiliki orang tua, dalam arti keterpahaman dan kemengertian, maka setiap kebijakan pendidikan SLP yang ditawarkan akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap optimisme dalam mempertimbangkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Sosial-ekonomi orang tua memberikan pengaruh sebesar 11,02%

*Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tingkat SLTP  
di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia*

terhadap penawaran pendidikan setelah faktor budaya. Kondisi sosial-ekonomi orang tua/keluarga merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam menawarkan kebijakan pendidikan SLP bagi orang tua, karena kondisi sosial-ekonomi itu adalah salah satu daya dukung keluarga untuk membentuk sikap optimisme orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Agar pendidikan SLP yang ditawarkan dapat menumbuhkan sikap optimisme orang tua, bahwa pendidikan merupakan komoditas yang dipertimbangkan dan kebutuhan pokok yang harus ditempuh oleh anak-anak mereka, maka kondisi kemampuan sosial-ekonomi untuk membiayainya harus menjadi bahan pertimbangan. Artinya, dalam penawaran itu harus senantiasa dikaitkan antara berbagai kemudahan dan keringanan pembiayaan pendidikan dengan keadaan sosial-ekonomi orang tua itu sendiri. Dengan demikian, meskipun kondisi sosial-ekonomi orang tua lemah, orang tua akan mempertimbangkan pendidikan anaknya ke tingkat SLP karena adanya keringanan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dan diberikan oleh pemerintah.

Keadaan sosial-ekonomi orang tua di daerah perbatasan memberikan sumbangan yang berarti bagi penawaran pendidikan, sebab pada umumnya mereka itu kondisi sosial-ekonominya sedang dan rendah yang tergolong miskin. Keadaan ekonomi orang tua yang miskin berkorelasi dengan rendahnya pendidikan pada suatu daerah. Pendidikan yang rendah akan menghasilkan pendapatan yang rendah pula dan meningkatkan kemiskinan, dan akan mengurangi kemampuan keluarga untuk menyekolahkan anak-anaknya (Republika, 4 September 1997). Hal ini sejalan dengan pendapat Morphet & Roe (1975) yang mengatakan bahwa keluarga dalam membiayai pendidikan akan membandingkan antara pembiayaan yang dikeluarkan dengan pendapatan per kapita yang diperoleh.

Dalam kaitannya dengan kemampuan ekonomi keluarga sebagai daya dukung pembiayaan pendidikan yang harus senantiasa dijadikan pertimbangan dalam penawaran pendidikan, Sumarno (1996) mengibaratkan bahwa menyekolahkan anak itu ibarat orang tua membelikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu pendidikan SLP yang ditawarkan di daerah perbatasan hendaknya lebih mengarah dan lebih menitik beratkan pada aspek sosial-ekonomi, seperti: pembebasan

SPP, pembebasan berbagai pungutan biaya, pelanggaran ketentuan pakaian seragam sekolah, pemberian bea siswa dan bantuan berbagai fasilitas belajar baik yang bersumber dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial dan GNOTA.

Faktor geografis memberikan sumbangan efektif sebesar 10,57% terhadap penawaran pendidikan. Hal ini dapat dipahami karena kondisi geografis daerah perbatasan Kalbar-Sarawak Malaysia terletak di pedalaman dan terpencil sehingga kelangkaan fasilitas pendidikan SLP sangat terbatas. Kelangkaan dan keterpencilan itu merupakan penyebab munculnya sikap pesimisme orang tua terhadap pendidikan SLP bagi anak-anak mereka yang berusia 13-15 tahun. Sikap pesimisme orang tua terhadap pendidikan SLP anak usia 13-15 tahun, penelitian ini menemukan bahwa anak usia tersebut yang belum sekolah sebanyak 3126 anak dari jumlah sebanyak 6691 orang anak.

Pesimisme orang tua terhadap pendidikan SLP ini cukup beralasan karena jenis lembaga pendidikan yang dikembangkan baru SMP dan MTs biasa, sementara SMP Terbuka, SMP Kecil, Kejar Paket B belum dapat dikembangkan, apalagi terobosan lain seperti SMP/MTs kelas jauh, dan SMP/MTs satu atap dengan SD/MI. Sementara itu, letak tempat tinggal orang tua anak usia 13-15 tahun dengan SMP atau MTs yang ada secara geografis tidak mendukung anak untuk melanjutkan ke SLP setelah tamat SD/MI.

Kondisi tersebut di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan Sodiq (1995) bahwa faktor geografis menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang terisolasi untuk mengikuti pendidikan, seperti jauhnya tempat tinggal dengan lokasi sekolah, sulitnya transportasi antar desa atau antar daerah pedalaman dan terpencil lainnya (Bintarto, 1989). Demikian juga halnya faktor geografis ini mengakibatkan sulitnya dan langkanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SLP yang diperlukan. Padahal, dalam kaitannya dengan penawaran pendidikan, Mugiadi (1992) mengatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek yang harus ditingkatkan pengadaannya, bahkan jarak tempuh yang diajukan oleh Chapin (dalam Darmono, 1993) yakni selama 20-30 menit jalan kaki dari rumah menuju sekolah.



***Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tingkat SLTP  
di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia***

Permintaan pendidikan orang tua secara langsung dan positif dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, dan budaya melalui penawaran pendidikan. Secara simultan keempat variabel tersebut memberikan sumbangan efektif sebesar 51,72%. Faktor geografis memberikan kontribusi paling besar 17,02%, kemudian diikuti oleh variabel budaya 15,46%, dan variabel sosial-ekonomi serta penawaran pendidikan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 11,39; dan 7,85%.

Faktor geografis memberikan kontribusi efektif yang paling besar terhadap permintaan pendidikan melalui penawaran pendidikan. Ini berarti, menunjukkan adanya sikap optimisme orang tua terhadap pendidikan dengan adanya kebijakan pendidikan SLP yang ditawarkan pemerintah yang memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi geografis. Sikap optimisme orang tua terhadap pendidikan sebagai akibat langsung dari penawaran pendidikan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi geografis akan melahirkan transaksi pendidikan yang dibutuhkan orang tua bagi anak-anaknya untuk melanjutkan ke tingkat SLP. Hal ini membuktikan teori yang dikemukakan oleh Sumarno (1996) bahwa permintaan pendidikan seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu informasi dan kondisi lingkungan dan sejumlah faktor internal seperti: (1) kebutuhan atau keinginan yang sudah dirasakan; (2) tata nilai dan norma yang dihayati; (3) kemampuan atau daya dukung yang dimiliki dalam pembiayaan; (4) persepsi dan peluang untuk diterima yang mungkin berhasil.

Merujuk pada teori tersebut di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa permintaan pendidikan orang tua itu selain dipengaruhi oleh faktor geografis yang memberikan kontribusi yang berarti, juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, budaya, dan penawaran pendidikan. Kontribusi masing-masing faktor tersebut: 15,45%; 11,39%; dan 7,85%. Dengan demikian permintaan pendidikan orang tua sebagai minat dan kebutuhan akan terwujud karena adanya pengaruh dari kondisi geografis, kondisi sosial-ekonomi, dan budaya melalui kebijakan pendidikan yang ditawarkan pemerintah. Dengan kata lain penelitian ini membuktikan bahwa permintaan seseorang akan pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kondusif seperti: keterjangkauan dan kemudahan antara lokasi sekolah dengan tempat tinggal anak; kemampuan ekonomi dan penghasilan; wawasan dan penghargaan

akan nilai pendidikan yang berlaku dalam masyarakat; serta minat dan kebutuhan yang dimiliki orang tua sebagai pertimbangan dalam kelanjutan pendidikan anaknya setelah tamat SD/MI.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Keputusan orang tua dipengaruhi secara langsung oleh variabel geografis, sosial-ekonomi, budaya, penawaran pendidikan, dan permintaan pendidikan. Secara simultan kelima variabel tersebut memberikan sumbangan efektif sebesar 57,04%. Sumbangan dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa faktor budaya memberikan pengaruh paling besar yaitu 23,56%, kemudian variabel geografis, penawaran pendidikan, sosial-ekonomi, dan permintaan pendidikan masing-masing memberikan sumbangan sebesar: 13,63%; 10,26%; 6,99%; dan 2,56%.

Faktor budaya memberikan sumbangan efektif paling besar terhadap keputusan orang tua. Hal ini menunjukkan kecocokan atau konsistensi antara pengetahuan, wawasan, nilai, dan penghargaan mengenai pendidikan SLP dengan keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya ke tingkat sekolah lanjutan pertama (SLP). Semakin tinggi pengetahuan, wawasan, nilai, dan penghargaan terhadap pendidikan semakin konsisten pula keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan sebaliknya. Temuan ini membuktikan bahwa pendidikan bagi masyarakat yang telah maju budayanya merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Namun, sebaliknya bagi masyarakat yang masih terbelakang budayanya pendidikan merupakan sesuatu hal yang memberatkan. Karena keterbelakangan budaya dalam penelitian yang dilakukan oleh Michael Walton (1997) akan membawa akibat pada dua faktor yaitu tingkat pendidikan dan kurangnya kemampuan kerja. Jadi keputusan orang tua (untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan) anaknya merupakan cermin tinggi rendahnya budaya yang dimilikinya.

Hasil penelitian ini menemukan pula bahwa faktor geografis, penawaran pendidikan, sosial-ekonomi, dan permintaan pendidikan memberikan pengaruh lebih kecil terhadap keputusan orang tua katimbang faktor budaya. Hal ini membuktikan bahwa keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak itu, jika telah dilandasi oleh faktor budaya yang telah maju maka apapun kondisi geografis, tinggi rendahnya sosial-ekonomi, ada

*Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tingkat SLTP  
di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia*

tidaknya penawaran pendidikan, dan tinggi rendahnya kebutuhan pendidikan bukan merupakan suatu hambatan dalam melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Buktinya bagi mereka yang telah maju budayanya, ia akan mengirimkan anaknya ke kota untuk sekolah, karena di desanya tempat tinggal dengan sekolah sulit untuk ditempuh. Orang tua yang telah maju budayanya, meskipun secara ekonomi ia tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya ia akan mencari bantuan melalui berbagai lembaga-lembaga sosial termasuk GNOTA. Orang tua yang telah maju kebudayaannya, ia akan menyekolahkan anaknya meskipun tidak ada berbagai kebijakan pendidikan yang ditawarkan, dan orang tua yang telah maju budayanya, telah menyamakan kebutuhan pendidikan itu sama pentingnya dengan kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel budaya mempunyai efek langsung yang bermakna terhadap keputusan orang tua. Keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya ke tingkat SLP merupakan perwujudan dari pengetahuan tentang pendidikan SLP, wawasan mengenai pendidikan SLP, nilai pendidikan yang dimiliki, dan penghargaan kepada pendidikan SLP yang tinggi atau sebaliknya. Budaya yang merupakan kristalisasi dari pengetahuan, wawasan, nilai, dan penghargaan kepada pendidikan SLP yang dimiliki orang tua adalah dasar yang kokoh untuk mengambil keputusan dalam menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya. Hal ini membuktikan teori yang dikemukakan Sodiq (1995) yang menyatakan bahwa budaya dapat mendukung sekaligus menghambat kesempatan seseorang untuk belajar.

Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel penawaran dan permintaan pendidikan mempunyai efek langsung yang besar bagi keputusan orang tua. Keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya ke tingkat SLP merupakan korelat antara keterpahaman terhadap pendidikan SLP dengan minat atau motivasi untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan. Hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Porter and Mills (dalam Wahjosumijo, 1987) yang mengatakan bahwa minat dapat dipengaruhi oleh ciri-ciri seseorang dan lingkungan serta faktor yang datang dari dalam dan dari luar diri seseorang.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa variabel sosial-

ekonomi berpengaruh langsung secara negatif bagi keputusan orang tua. Keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya bukan merupakan akibat langsung dari kondisi sosial-ekonomi. Penelitian ini menolak teori yang dikemukakan oleh Sumarno (1996) yang menyatakan bahwa faktor sosial-ekonomi merupakan salah satu daya dukung dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini berarti bahwa seseorang yang kondisi sosial-ekonominya rendah dapat saja menyekolahkan anaknya tanpa menanggung biaya, karena biaya pendidikan anaknya itu ditanggung oleh orang lain atau suatu lembaga tertentu.

Dalam konteks inilah maka lembaga-lembaga bantuan pendidikan, seperti lembaga GNOTA menempati posisi strategis. Demikian juga halnya dengan orang tua yang kondisi sosial-ekonominya baik, mungkin saja tidak menyekolahkan anaknya ke tingkat SLP, karena ia menganggap bahwa manfaat ekonomis secara langsung dari pendidikan itu sulit dicapai. Hal ini terbukti dengan kondisi sosial-ekonomi orang tua di daerah perbatasan, dari 100 rumah terdapat 36 rumah yang memiliki antena parabola. Setelah dicek ternyata dari 36 yang memiliki parabola itu yang menyekolahkan anaknya hanya 6 orang, sementara sisanya tidak menyekolahkan anaknya ke tingkat SLP setelah tamat SD/MI, justru malah mengirim anaknya untuk mencari pekerjaan di Sarawak malaysia sebagai buruh di perkebunan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel geografis mempunyai efek langsung terhadap keputusan orang tua meskipun kecil kebermaknaannya. Keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya, kondisi geografis merupakan salah satu pertimbangan penting bagi orang tua, terlebih bagi orang tua yang bertempat tinggal di lokasi yang tingkat keterpencilan dan kelangkaan sarana pendidikannya sulit. Hal ini logis karena keterpencilan dan kelangkaan akan berakibat pada rendahnya minat orang tua dalam melanjutkan pendidikan anaknya ke tingkat SLP. Rendahnya minat ini akan bermuara pada rendahnya transaksi pendidikan dalam keluarga, sebagai salah satu dasar keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLP. Hal ini mendukung teori yang mengatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, dalam hal ini lingkungan geografis yang kurang mendukung.

Faktor geografis, sosial-ekonomi, dan budaya mempunyai efek tidak

*Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tingkat SLTP  
di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia*

langsung bagi keputusan orang tua melalui penawaran dan permintaan pendidikan. Keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya merupakan korelat antara faktor geografis, sosial-ekonomi, dan budaya dengan penawaran dan permintaan pendidikan yang mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi geografis, sosek, dan budaya masyarakat tertentu. Karena penawaran yang berhasil adalah yang sesuai dengan sifat keinginan masyarakat, dimana suatu masyarakat atau seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu barang konsumsi akan sangat bergantung pada kebutuhan dan harga yang ditawarkannya. Orang tua dalam memutuskan untuk menempuh pendidikan anaknya didasari oleh kebutuhan akan pendidikan itu serta kemampuan untuk membiayainya, sehingga menyekolahkan anak itu diibaratkan orang tua "membelikan kesempatan memperoleh pendidikan" bagi anaknya.

Keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang merupakan korelat antara faktor geografis, sosek, dan budaya dengan penawaran dan permintaan pendidikan adalah sebagai bukti adanya transaksi pendidikan yang terjadi dalam keluarga. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Sumarno (1996), yaitu tidak dapat diingkari bahwa dalam masyarakat terjadi "jual beli pendidikan" seiring dengan terjadinya perubahan nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Pendidikan sebagai suatu proses transaksi tidak akan terlepas dari berbagai aspek yang terlibat di dalamnya. Aspek itu ialah: penawaran jasa pendidikan; permintaan untuk memperoleh pendidikan; transaksi pendidikan; dan kesempatan pendayagunaan belajar (Sumarno, 1996).

Hasil dekomposisi efek antar variabel yang dilibatkan dalam model penelitian ini semakin membuktikan teori yang dikemukakan Sumarno (1996) yang menyatakan bahwa transaksi pendidikan yang terjadi dalam keluarga tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya seperti: penawaran jasa kependidikan, permintaan untuk memperoleh kesempatan pendidikan, transaksi pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, nilai-nilai budaya yang berlaku, daya dukung pembiayaan, dan lingkungan. Dekomposisi efek menemukan bahwa faktor sosial-ekonomi bukan merupakan efek langsung terhadap keputusan orang tua, melainkan mempunyai efek tidak langsung melalui variabel permintaan dan

penawaran pendidikan. Sedangkan faktor geografis, budaya, penawaran pendidikan, dan permintaan pendidikan mempunyai efek langsung bagi keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya, maupun mempunyai efek tidak langsung melalui penawaran dan permintaan pendidikan. Budaya (pengetahuan, wawasan, nilai, dan penghargaan pada pendidikan) mempunyai efek tidak langsung maupun langsung sangat bermakna bagi keputusan orang tua, kemudian diikuti oleh variabel penawaran dan permintaan pendidikan, geografis dan sosial-ekonomi.

Dengan demikian, variabel budaya merupakan variabel yang sangat strategis yang melandasi terjadinya transaksi pendidikan dalam keluarga sebagai keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SLP di daerah perbatasan Kalbar-Sarawak Malaysia. Dengan kata lain, untuk meningkatkan transaksi pendidikan sebagai keputusan orang tua akan lebih efektif manakala faktor budaya dijadikan landasan utama dalam penawaran dan permintaan pendidikan, serta faktor geografis dan sosial-ekonomi sebagai pendukung dalam melanjutkan pendidikan anak usia 13-15 tahun ke tingkat SLP di daerah perbatasan Kalbar-Sarawak Malaysia.

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa anak usia 13-15 tahun di daerah perbatasan Kalbar-Sarawak Malaysia banyak mengalami hambatan untuk memperoleh pendidikan tingkat SLP. Hambatan yang sangat menonjol adalah masalah budaya. Budaya yang dimaksudkan ialah pengetahuan, wawasan, dan penghargaan terhadap nilai pendidikan masih rendah, sehingga orang tua anak usia 13-15 tahun belum tersentuh keinginannya untuk menyekolahkan anak ke SLP setelah tamat SD. Belum tersentuhnya keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak ke SLP kemungkinan lebih disebabkan oleh belum banyaknya menerima informasi dan kebijakan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun tingkat SLP.

Orang tua anak usia 13-15 tahun di daerah perbatasan, agaknya wajar, jika belum banyak menerima informasi tentang wajib belajar 9 tahun dan seluruh kebijakan yang ditawarkan karena letak geografis tempat tinggal mereka terpencil bahkan pedalaman yang sulit, sehingga mereka menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal informasi. Jika meminjam istilah Rogers (1971) mereka itu termasuk masyarakat *late majority* dan *laggards*.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan kepada hasil-hasil penelitian, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tingkat SLP bagi anak usia 13-15 tahun di daerah perbatasan Kalbar-Sarawak Malaysia masih rendah, karena parameter angka partisipasi murni (APM) baru mencapai 32,52%; 2) Kebijakan SLP yang ditawarkan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tingkat SLP masih terbatas pada SMP dan MTs biasa serta Kejar Paket B; 3) Perbedaan kesempatan dan perluasan memperoleh pendidikan SLP bagi anak usia 13-15 tahun di daerah perbatasan disebabkan oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, budaya, penawaran dan permintaan pendidikan serta keputusan orang tua; 4) Faktor geografis, sosial-ekonomi, dan budaya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap penawaran pendidikan; 5) Permintaan pendidikan dipengaruhi langsung dan signifikan oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, budaya, dan penawaran pendidikan, maupun tidak langsung melalui penawaran pendidikan; 6) faktor geografis, sosial-ekonomi, dan budaya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap keputusan orang tua, maupun tidak langsung melalui penawaran dan permintaan pendidikan; 7) Faktor geografis, budaya, penawaran pendidikan, dan permintaan pendidikan merupakan penyebab langsung bagi keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anak usia 13-15 tahun, maupun penyebab tidak langsung melalui penawaran dan permintaan pendidikan; 8) Faktor budaya merupakan penyebab yang berpengaruh paling besar/kuat bagi keputusan orang tua, kemudian diikuti oleh penawaran pendidikan, permintaan pendidikan, geografis dan yang paling lemah/kecil adalah faktor sosial-ekonomi; 9) Faktor sosial-ekonomi bukan merupakan penyebab langsung bagi keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang berusia 13-15 tahun, melainkan menjadi penyebab tidak langsung lewat penawaran pendidikan dan permintaan pendidikan.

## **Daftar Pustaka**

- A. Daliman, (1995). "Gerakan Wajib Belajar Sebagai Prinsip Pendidikan Untuk Semua, Hakekat serta Tantangannya", *Cakrawala Pendidikan* Edisi Khusus Dies, Mei.
- Asrori, M. dan Harun, (1992). *Pandangan Masyarakat Sekayam Terhadap Dibukanya Jalur Lintas Batas Indonesia-Malaysia dan Implikasinya terhadap Perilaku Ekonomi dan Pendidikan. Pontianak: Laporan Penelitian* Dibiayai oleh P4M Diktiti Bantuan Bank Dunia.
- Asrori, M. (1996). *Penuntasan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Propinsi Kalimantan Barat. Pontianak: Laporan Hasil Penelitian*. FKIP UNTAN.
- Bintarto, R. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R. dan Hadisumarno, S (1991). *Metode Analisis Geografi*. Jakarta: LP3ES.
- Coleman, James (1966). *Equality of Education Opportunity*, Washington, Dc.,: Department of Health, Education and Welfare.
- Darmono. (1993). "Tinjauan Geografis tentang Profil dan Pola Penyebaran Penduduk dan Lokasi sekolah, *Pelangi Pendidikan*, 3 (11), Mei: 1-6.
- Depdikbud, (1995). *Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas Pencapaian Sasaran dan Program Depdikbud 1994/ 1995: Bahan Paparan pada Rakernas Depdikbud tanggal 21 s.d 24 Mei 1995 di Sawangan Bogor, Jakarta*.
- Farrell, P. Joshep And Sciefebein, Ernesto (1982). *Eight Years of Their Lives, From School to The Labor Market in Cili. Ottawa: International Development of Research Centre*.
- Grant, A. Carl. (1990). "Barriers And Facilitators to Equity in The Holmes Group." *Theory Into Practice Education: Reforming Education The Holmes Agenda, Volume XXIX, Number 1, Winter*.
- Jalaludin Rahmat (1996). "AFTA Mengancam Lembaga Pendidikan Indonesia", *Republika*, 10 Juni.

***Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tingkat SLTP  
di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia***

- Muhyadi (1994). *Pemerataan Pendidikan: Analisis Empiris dan Perspektifnya, (Makalah dalam Pelatihan Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar)*, Cipayang: Puslitbang Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Morphet, L. Edgar and Johns, L. Roe (1975). *The Ekonomik and Financing of Education: A Systems Approach*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Mugiadi, H. (1992). "Delema Antara Perluasan Kesempatan Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan". *Mimbar Pendidikan*, 1, (11)
- Newcomb, Theodore M. et. al. (1985). *Psikologi sosial*. (Yoesoef Noesjirwan, dkk. Terjemahan). Bandung: CV. Diponegoro.
- Noeng Muhadjir (1993). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta: Rakesarasin.
- Republik Indonesia (1989). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Setneg.
- Republik Indonesia (1992). *Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta: BKKBN.
- Sodiq A. Kuntoro, (1995). "Pendidikan Untuk Semua: Pendekatan Budaya", *Cakrawala Pendidikan*, Edisi Khusus Dies, Mei.
- Sumarno, (1985). *Selected Determinant of Expectations For Higher Education Among The Final Students of Senior Scondary Schools In The Special Region Of Yogyakarta Indonesia*, *Disertasi, Macquarie University, Australia*.
- Sumarno, (1996). *Hambatan dan Strategi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Makalah dalam Seminar Wajib Belajar 9 tahun oleh Mahasiswa KKN IKIP Yogyakarta di Kecamatan Seyegan, Seleman, 1 Juni*.
- Sumarno, (1995). "Peranserta Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan an Untuk Semua", *Cakrawala Pendidikan*. Edisi Khusus Dies, Mei.
- Tim JARLIT Kalbar. (1995). *Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar di Kalimantan Barat. Pontianak: Laporan Penelitian Kersajama Bappeda Tingkat I Kalbar dengan Puslit Balitbang Dikbud*.

- Tim JARLIT Sumsel. (1995). *Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar di Sumatra Selatan. Sumatra Selatan: Laporan Penelitian Kerjasama Bappeda TK 1. Sumsel dengan Puslit. Balitbang Dikbud.*
- Tim Peneliti Daerah Perbatasan. (1990). *Identifikasi Masalah Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Barat Dengan Sarawak Malaysia. Pontianak: Lembaga Penelitian Untan.*
- Wahjosumidjo. (1987). *Kepemimpinan dan motivasi.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Walton, Michael (1997). "Kemiskinan dan Ketidakmerataan: Wajah Lain Keajaiban Ekonomi Asia", Laporan Bank Dunia, *Republika*, 4 September.
- Wardiman (1996). "Anggota Majelis Taklim Harus Sukseskan Wajar 9 Tahun", *Republika*, 3 Juli.
- Wardiman (1993). *Pengarahan Mendikbud Pada Rapat Kerja Keuangan Dalam Rangka Persiapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Penyusunan Anggaran Rutin 1994/1995 Tanggal 10 November.* Jakarta: Kumpulan Pidato Mendikbud RI, Depdikbud.
- William, N. Dunn (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.